

Judul : Keberpihakan pemerintah pada guru swasta masih dipertanyakan
Tanggal : Sabtu, 26 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Keberpihakan Pemerintah Pada Guru Swasta Masih Dipertanyakan

Perhatian Pemerintah terhadap nasib guru terus ditingkatkan. Namun, perhatian tersebut dinilai lebih berfokus pada guru di sekolah negeri. Sementara itu, guru di sekolah swasta masih belum mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini pun menjadi perbincangan.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar

kesejahteraan pendidik tidak hanya difokuskan pada guru sekolah negeri. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuntut afirmasi nyata bagi guru swasta dan tenaga kependidikan (tendik).

Desakan ini disampaikan Fikri dalam Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendikdasmen TA

2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

"Ini guru sudah diperhatikan, tetapi masih di sekolah negeri. Selanjutnya, bagaimana caranya advokasi atau afirmasi pada guru di sekolah swasta?" tegas Fikri Faqih.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur berpandangan, saat ini Pemerintah belum memberikan kebijakan khusus

untuk memberikan peluang bagi rekan-rekan guru honorer yang berada di sekolah-sekolah swasta.

"Khususnya bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun," ujar Mansur kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (24/9/2026).

Dia mengungkapkan, satu-satunya peluang yang masih tersedia bagi mereka adalah tidak adanya larangan untuk tetap mengajar. Selain itu, lanjut Mansur, mereka tetap boleh

dibayar menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) selama sudah tercatat di dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

"Jadi kalau dibuang, ini keberpihakan Pemerintah kepada guru swasta," ungkap Mansur.

Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih dan Mansur terkait keberpihakan Pemerintah kepada guru honorer di sekolah swasta, berikut wawancaranya.

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR

Nasib Guru Swasta Kerap Dipinggirkan



Apa pandangan Anda terkait kebijakan Pemerintah terhadap nasib guru di sekolah swasta?

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebenarnya tidak hanya fokus pada kesejahteraan guru di sekolah negeri saja.

Selama ini, bagaimana perhatian terhadap nasib guru di sekolah swasta?

Selarasnya ada afirmasi nyata bagi guru swasta dan tenaga kependidikan di sekolah swasta. Bukan hanya sekolah negeri saja.

Bukankah sudah banyak kebijakan Pemerintah bagi kesejahteraan guru?

Memang nasib guru sudah diper-

hatikan, tetapi selama ini masih di sekolah negeri saja. Sementara itu, di sekolah swasta belum.

Menurut Anda, perlu ada langkah konkret untuk sekolah swasta juga?

Menurut saya, harus ada upaya bagaimana caranya melakukan advokasi atau afirmasi terhadap guru di sekolah swasta. Selain itu, nasib tenaga kependidikan kerap terpinggirkan dalam pembahasan kesejahteraan. Padahal, Kemendikdasmen memiliki Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Selain soal kesejahteraan guru di sekolah swasta, hal apa lagi yang

masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah?

Kami juga menyoroti kondisi darurat infrastruktur pendidikan. Dari 1,8 juta ruang kelas yang tercatat pada rentang 2014-2024, sekitar 1,3 juta di antaranya rusak. Hanya kira-kira 500.000 yang layak, atau tepatnya 466.000. Untuk itu, kami meminta pengawasan ketat terhadap anggaran revitalisasi Rp 5 triliun yang telah dikembalikan.

Lantas, apa saran Anda?

Kami berharap ada penguatan monitoring revitalisasi sarana dan prasarana agar sekolah dengan kondisi rusak dan tidak layak dapat segera ditangani. ■ *nwm*

MANSUR, Sekretaris Jenderal FSGI

Belum Ada Kebijakan Khusus Bagi Guru Swasta



Apa pandangan Anda terkait kebijakan Pemerintah terhadap nasib guru di sekolah swasta?

Menurut Ibu Nunuk Suryani (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), mereka juga memiliki hak yang sama untuk mengikuti tes CPNS maupun PPPK jika usianya masih di bawah 35 tahun.

Bagaimana Anda melihat kebijakan Pemerintah terhadap guru swasta selama ini?

Pemerintah belum memberikan kebijakan khusus untuk merekrut atau memberikan peluang bagi rekan-rekan guru honorer yang berada di sekolah-

sekolah swasta, khususnya bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun. Ya, sangat disayangkan. Namun, satu-satunya peluang yang masih tersedia bagi mereka adalah tidak adanya larangan untuk tetap mengajar. Selain itu, mereka tetap boleh dibayar menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) selama sudah tercatat di dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Jadi, kalau dibuang keberpihakan Pemerintah kepada guru swasta, ya, itu saja.

Jadi, guru honorer di sekolah swasta bisa dibayarkan dengan dana BOS?

Iya. Mereka bisa dibayarkan melalui Dana BOS selama guru tersebut sudah

terdaftar di dalam Dapodik atau, syukur-syukur, sudah mendapatkan sertifikasi pendidik. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan Rp 2 juta per bulan.

Bagaimana dengan yang belum sertifikasi?

Kalau belum, tentu sangat-sangat minim. Mereka hanya bisa mendapatkan bayaran dari Dana BOS dan relatif sangat kecil. Selain itu, mereka tidak bisa menerima setiap bulan.

Kenapa tidak setiap bulan?

Ya, karena harus menunggu Dana BOS cair. Itu pun kadang semau sekolahnya. Tidak ada standar yang baku dalam peraturan. ■ *nwm*